

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisa hasil penelitian mengenai perbandingan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan tahun 2005 sampai tahun 2008 yang dibandingkan dengan teori dan pelaksanaan di lapangan, maka dapat dicermati bahwa secara umum, program-program penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya di Kota Pekalongan memiliki kecenderungan yang sangat dipengaruhi oleh program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional. Pengaruh ini juga menyebabkan program-program penanggulangan kemiskinan tidak dapat optimal menjawab permasalahan kemiskinan. Sehingga perencanaan dan koordinasi di tingkat daerah juga tidak dapat berjalan baik, karena secara struktural dan fungsional adanya kelembagaan yang berbeda terkait dengan pembagian kewenangan dalam mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan. Faktor kelembagaan ini juga yang menyebabkan tidak mempunyai sinergi dengan lembaga atau institusi yang lain. Lebih jauh adanya desentralisasi dan pemilu kepala daerah langsung, acapkali berpengaruh pada dinamika politik terkait dengan target-target penanggulangan kemiskinan. Jika kepala daerah yang memimpin merupakan kepala daerah yang memahami permasalahan kemiskinan maka cenderung akan melahirkan inovasi-inovasi khusus yang diarahkan untuk program-program kemiskinan, begitupun sebaliknya jika yang terpilih adalah kepala daerah yang tidak memahami permasalahan kemiskinan, maka akan sulit ditemukan program-program yang diarahkan secara serius untuk penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, permasalahan data kemiskinan dan strategi program-program penanggulangan kemiskinan yang belum utuh dan matang mengakibatkan adanya kecenderungan perilaku alokasi anggaran yang tidak efektif, boros dan tidak tepat sasaran.

Sedangkan terkait dengan program dan perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, maka dapat diambil kesimpulan;

1. Peningkatan perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun 2005 sampai tahun 2008 tidak mampu memenuhi target penurunan angka kemiskinan. Perilaku anggaran ini menyebabkan target-target pembangunan khususnya program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan belum berhasil atau gagal.
2. Program penanggulangan kemiskinan yang digagas Pemerintah Kota Pekalongan melalui pendekatan Tribina dan pola "Sapu Lidi" cukup membantu pemerintah daerah dalam memetakan program-program penanggulangan kemiskinan antar SKPD serta mengklarifikasi sasaran pola hibah bagi KK miskin diluar program penanggulangan kemiskinan PNPM-MP. Langkah program penanggulangan kemiskinan dengan konsep Tribina yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas untuk mendapat gambaran program secara umum. Karena hanya mampu memetakan program-program dan mengklarifikasi pola hibah bagi KK miskin maka akar permasalahan penanggulangan kemiskinan sendiri belum menemukan arah strategi yang terpadu baik antar SKPD maupun stakeholder lain; legislative, institusi struktural pusat, dan kelompok masyarakat. Begitupun dalam pelaksanaannya, konsep ini terbentur dengan kelembagaan "siapa berwenang untuk mengkoordinasi dan melaksanakan supervisi". Peran tim koordinasi hanya bersifat ad-hoc dan tidak mempunyai peran optimal dalam menyelaraskan program-program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa SKPD. Adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pekalongan, masih terkendala dalam melakukan koordinasi dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
3. Adanya perilaku anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan yang meningkat dipengaruhi juga oleh program-program dari pusat seperti program dari Departemen/Kementerian Perumahan Rakyat, Departemen/Kementerian Pekerjaan Umum dan sumber pendanaan lainnya. Kecenderungan perilaku anggaran ini

mengakibatkan ada sebagian permasalahan penanggulangan kemiskinan yang tidak bisa dipecahkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri, masih sangat tergantung pada pemerintah pusat serta proses perencanaan "top-down" tanpa melibatkan peran serta pemerintah kota dan masyarakat. Kebijakan dari pusat ini, juga tidak diikuti sosialisasi dan pemahaman yang baik oleh stakeholder daerah sehingga terkesan program berjalan sendiri, misalnya Program PNPM-MP. Walaupun juga ada program dari pemerintah pusat yang langsung terintegrasi dengan baik ke daerah misalnya program rumah inti tumbuh dari kementerian perumahan rakyat.

## 6.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pengamatan selama melaksanakan penelitian, beberapa hal dapat menjadi saran;

1. Kajian dan evaluasi kinerja institusi, bahwa adanya perilaku kenaikan anggaran penanggulangan kemiskinan yang besar tetapi kurang berdampak terhadap target penanggulangan kemiskinan diantaranya penurunan angka kemiskinan, maka diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui akar permasalahan serta evaluasi tentang kebijakan maupun efektifitas belanja-belanja program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka menjalankan saran ini, maka diperlukan penyepakatan-penyepakatan target-target institusi dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan. Partisipasi dari masyarakat yang akan menjadi target program penanggulangan kemiskinan, target-target ini juga harus dijabarkan dan dioperasionalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi. Penjabaran ini misalnya dapat dilakukan dengan pembuatan pedoman bersama tentang tugas dan tanggung jawab, tujuannya agar tidak terjadi *overlapping* program untuk satu wilayah, menjaga efektifitas program dan tanggung jawab pelaksana serta mengurangi dampak adanya potensi korupsi. Jika diperlukan ada penghargaan-penghargaan dengan kriteria tertentu jika institusi yang bersangkutan mampu melampau target-target yang dikhususkan untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Peran walikota dan dukungan

legislative sangat menentukan dalam memberikan arah dan tanggung jawab penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan target-target yang harus dipenuhi.

2. Kelembagaan dan Program affirmative, kecenderungan masih kuatnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dapat diberikan peluang dan apresiasi yang memungkinkan tumbuhnya partisipasi, dan inovasi-inovasi atas program penanggulangan kemiskinan yang bersifat lokal. Untuk Pemerintah Kota Pekalongan sendiri, peran kelembagaan yang solid misalnya melalui TKPKD atau peran kelembagaan lain diharapkan mampu mengkoordinasi program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dikembangkan dengan pola “Sapu Lidi” dan pendekatan Tribina hendaknya juga dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat terkait program penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka merangsang partisipasi aktif masyarakat miskin, perlu juga dikembangkan program-program *affirmative action* khususnya bagi masyarakat rentan seperti penyandang cacat, janda tua miskin, lansia, anak-anak dan daerah terpencil. Program-program yang sangat khusus tersebut diperuntukkan untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berkekurangan dan dalam kondisi rentan. Peran stakeholder sampai ke wilayah kelurahan diharapkan mampu menjadi ujung tombak sosialisasi dan pemahaman program. Perlu juga ditekankan tentang hak-hak masyarakat miskin dan rentan yang memang memerlukan perhatian khusus, hal ini bertujuan agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran serta masyarakat lain yang bukan target penerima program penanggulangan kemiskinan menghormati kelompok masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan. Hal ini juga ditujukan untuk mengurangi budaya “mengaku miskin” yang seringkali mengganggu ketika proses perencanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan ditingkat masyarakat. Sehingga diharapkan dokumentasi data masyarakat miskin menjadi lebih dengan indikator-indikator lokal yang memang telah disepakati.

3. Sosialisasi dan Partisipasi, adanya peningkatan perilaku alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang meningkat disarankan agar bisa disosialisasikan dan terbuka untuk mendapat masukan dari masyarakat. Hal ini diharapkan agar perilaku anggaran juga bisa mewarnai perilaku masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terencana dan terukur. Begitupun alokasi anggaran program yang berasal dari pusat hendaknya mampu dipelihara dan dikembangkan lebih baik agar berbagai inovasi mampu tumbuh dan bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain. Bagi program-program yang mempunyai target waktu terbatas dan dinilai berhasil maka hendaknya mampu dikembangkan dan diusahakan untuk direncanakan kelanjutannya. Peran TKPKD atau tim sejenis yang dibentuk dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar diperkuat untuk menyelaraskan program-program penanggulangan kemiskinan serta diberikan kewenangan yang jelas agar masalah-masalah koordinasi dan kelembagaan tidak lagi ditemukan dalam suatu pemerintah daerah, walaupun hal ini tentu akan dipengaruhi faktor politik kekuasaan.